

**PERAN SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN PADA
BUMDES DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DESA SERTA KESEJATERAAN MASYARAKAT DI
DESA SUMBERSEKAR**

(Studi kasus di Desa Sumbersekar kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh gelar Sarjana Manajemen



OLEH

BIBIANA RIPING

2018120177

UNIVERSITAS TRIBUHWANA TUNGGADDEWI

FAKULTAS EKONOMI

MALANG

2022

PERAN SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN PADA BUMDES DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA SERTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SUMBERSEKAR

Bibiana Riping¹⁾, Totok Sasongko²⁾, Imam Hidayat³⁾

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana
Tunggadewi Malang 2022

Email: bibianariping@gmail.com

RINGKASAN

Sistem Manajemen Keuangan BUMDes berperan penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sumbersekar Malang . Tujuan riset ini untuk mengetahui fungsi dari sistem manajemen keuangan pada BUMDES untuk meningkatkan pendapatan asli desa. riset yang digunakan ialah menggunakan metode penelitian kualitatif. data yang digunakan yaitu metode wawancara dengan direktur BUMDes, sekretaris BUMDes , bendahara BUMDes, dan kepala desa Sumbersekar Malang dan dokumentasi menggunakan laporan keuangan desa sumbersekar tahun 2017-2021. Untuk menganalisis data menggunakan ialah deskriptif. Dari hasil riset membuktikan bahwa fungsi sistem manajemen keuangan pada BUMDes sangat penting untuk mengontrol aktivitas keuangan BUMDes untuk meningkatkan pendapatan asli desa . pendapatan asli desa yang tinggi digunakan untuk pembangunan desa sehingga secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. sistem manajemen keuangan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa sumber sekar malang meliputi sistem manajemen keuangan, pengelolaan, pemasaran dan sumber daya manusia. kontribusi pendapatan BUMDes terhadap pendapatan asli desa di desa sumbersekar malang dinyatakan sangat baik karena nilai rata-rata sebesar 79,50 % atau diatas 50 %. pendapatan BUMDes yang tinggi dengan langsungnya memberi peningkatan pendapatan asli desa yang digunakan untuk biaya pembangunan desa.

Kata kunci :BUMDes, Kesejahteraan Masyarakat, Pendapatan Asli Desa dan Sistem Manajemen Keuangan .

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 terkait Desa, yang dimaksud dengan desa ialah kesatuan wilayah hukum yang memiliki batas wilayah yang disahkan untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Kepentingan daerah setempat yang berdekatan dengan mempertimbangkan dorongan daerah setempat, hak-hak istimewa awal, serta kebebasan-kebebasan adat yang dirasakan dan diperhatikan dalam pengaturan kekuasaan umum negara kesatuan republik Indonesia. Undang-undang juga menyatakan bahwa kepala desa sebagai pemerintah desa memiliki 15 spesialis. wewenang yang berhubungan dengan dana desa, khususnya untuk mengawasi dana dan sumber daya desa, memutuskan pendapatan desa dan rencana pengeluaran konsumsi, mendorong dan mengembangkan lebih lanjut ekonomi desa dan mengkoordinasikannya untuk mencapai skala ekonomi yang berguna untuk perkembangan terbaik wilayah desa, membina desa membayar sumber, dan mengusulkan dan mengakui penunjukan. sebagai kelimpahan Negara untuk bekerja pada bantuan pemerintah jaringan negara.

Administrasi keuangan desa tentunya harus dilengkapi dengan sistem administrasi yang baik dan bertanggung jawab mengingat aset yang masuk ke desa bukanlah aset kecil, namun sangat besar untuk dikelola oleh pemerintah desa. pengaturan publik di mana proses perencanaan dan pengaturan terjadi. eksekusi melalui asosiasi dan organisasi yang berbeda dan untuk mencapai hasil yang ideal, pelaksanaan strategi publik harus dikontrol. Dari penjelasan master jelas eksekusi pengaturan yang bagus di dalamnya dipengaruhi oleh siklus administrasi yang bagus untuk mencapai sesuatu yang diharapkan ketika eksekusi strategi sedang berjalan. Lebih lanjut Cordial dan Rahmadani (2007) menyatakan bahwa para pelaksana kebijakan ialah melaksanakan atau eksekusi suatu pengaturan melalui program, latihan, kegiatan, atau latihan. aktivitas dalam komponen yang melekat pada kerangka kerja tertentu.

Pembangunan ialah usaha menggarap bantuan pemerintah dari seluruh keberadaan daerah, bangsa, dan negara untuk mencapai tujuan umum yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945. Desa berperan penting dalam upaya peningkatan publik karena masyarakat Indonesia pada umumnya akan tinggal di daerah pedesaan sehingga berdampak luas dalam upaya pengembangan publik untuk membantu kemajuan publik jelas harus diikuti oleh kemajuan di daerah provinsi. Peningkatan keuangan teritorial ialah komponen di mana masing-masing legislatif provinsi dan jaringan terdekat mengawasi aset yang

dapat diakses dan membuat desain mitra antara negara tetangga dan area rahasia untuk membuat posisi baru dan memperkuat peningkatan pergerakan moneter (pembangunan keuangan). di kabupaten (Arsyad, 2004: 298).

Perbaikan keuangan ialah teknik yang menggabungkan kemajuan perusahaan baru, kemajuan perusahaan sebagai pilihan lain, peningkatan retensi pekerjaan yang ada untuk membuat item dan administrasi yang lebih baik, pengakuan sektor bisnis baru, pertukaran informasi dan inovasi, dan perbaikan organisasi. (Subsidi, 2016: 133). namun, masalah utama ialah masalah strategi kemajuan di wilayah yang terhubung. Tujuan kemajuan daerah diharapkan untuk membuat kehidupan yang layak, sejahtera dan dapat dikelola dan pada tahap terakhir akan mengakui rencana yang berfokus pada bidang latihan yang berbeda diatur, baik oleh otoritas publik atau oleh daerah rahasia (Tarigan, 2005: 10). bantuan pemerintah yang seimbang, sehingga memperkecil jurang pemisah antara wilayah metropolitan dan pedesaan. Perbaikan desa yang diselesaikan akan meningkatkan pendapatan lingkungan yang dengan demikian dapat meningkatkan derajat bantuan pemerintah daerah setempat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara lebih ideal dan cakap untuk meratakan bantuan pemerintah terhadap keberadaan daerah sekitarnya. Bantuan pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak bisa dilarang. Bantuan pemerintah yang besar juga

merupakan suatu tanda peningkatan yang layak, dimana jika tingkat bantuan pemerintah daerah tidak dijadikan sebagai tolak ukur perbaikan, maka akan menimbulkan disparitas dan ketimpangan dalam suatu ruang. Penyelenggaraan BUMDES dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan daerah. Pengurus BUMDES dengan langsung mengikutsertakan daerah diharapkan memiliki opsi untuk menggerakkan perekonomian daerah dalam mengembangkan lebih lanjut bantuan pemerintah daerah. Setiap desa yang telah membingkai Usaha yang Diklaim Desa diberikan aset dari otoritas publik. Setiap bisnis desa yang dijalankan menikmati keuntungannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan yang terdapat di desa-desa tersebut.

Demikian pula Administrasi Moneter Dalam penyelenggaraan BUMDes diperlukan kerangka tenaga ahli dan para eksekutif agar dapat diandalkan dalam kemajuan usaha BUMDes, sehingga permasalahan yang terjadi pada BUMDes di Peraturan Bengkulu ialah: para kepala BUMDes yang telah dipilih dalam mengawasi BUMDes baik dari dewan maupun kerangka moneter. Tidak ada yang namanya tujuan agar tata kelola moneter dan kerangka pengurus dilakukan di BUMDes. Dari persoalan-persoalan yang dihadapi, penting untuk melakukan langkah baik sebagai sosialisasi maupun persiapan terhadap desa-desa yang pemerintahannya sudah berbentuk namun belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Ringkasan fiskal ialah item yang dibuat oleh bidang atau disiplin pembukuan. Selanjutnya, SDM (SDM) yang terampil diharapkan mampu membuat laporan keuangan yang berkualitas. Kemampuan aset manusia ialah kapasitas individu atau individu dalam suatu asosiasi (kelembagaan) atau kerangka kerja untuk melakukan kemampuan atau posisinya untuk mencapai tujuannya dengan benar dan mahir (Emilda Ihsanti, 2014).

1.2. Rumusan Masalah

Melalui pemaparan yang sudah tertuang di latar belakang sehingga timbulah perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran sistem manajemen Keuangan pada BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta kesejahteraan masyarakat ?
2. Apa saja peran BUMDes dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mencatat keuangan desa serta mengelola aset dan jasa pelayanan bagi usaha desa?
2. Untuk mengetahui permasalahan serta kendala yang terjadi di masyarakat dan keberadaan BUMDes juga membantu mengembangkan potensi desa dan menggerakkan sumber ekonomi serta menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat desa.

1. 4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi desa, masyarakat, serta sumber informasi maupun referensi bagi penyelesaian karya tulis ilmiah serupa untuk selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Akademis

Harapannya riset ini bisa menjadikan sebuah acuan, bahan proporsional, acuan riset berikutnya dan juga bacaan untuk desa yang menginginkan.

1.4.3 Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa

1. mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman yang dapat diterapkan atau sebagai bekal disuatu hari yang akan datang
2. mengetahui perubahan yang terjadi di masyarakat Desa Sumbersekar dan mendapatkan informasi yang lebih detail tentang kondisi masyarakat desa sumbersekar
3. terjalin relasi yang baik di antara Desa Sumbersekar, dan Mahasiswa maupun pihak kampus.

b. Bagi Universitas

1. Dapat menjadi referensi tambahan tentang pentingnya peran manajemen dalam mengelola keuangan desa

2. Dapat memberikan referensi ilmiah yang mampu memberikan paradigma baru ,dan juga sebagai koleksi pustaka bagi pemerin taha desa ,baik di tingkat fakultas maupun Universitas.

c.Bagi Desa dan Masyarakat

1. Penelitian ini diharapkan sebagai informasi tambahan pagi pihak desa dan masyarakat
2. Menambah pengetahuan bagi desa agar dapat mengetahui peran manajemen pada BUMdes.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Cahiril dkk. *Analisis Penggunaan Anggaran Biaya Administrasi Umum Dan Efisiensi Terhadap Peningkatan Kinerja Supervisor*. JURNAL Akuntansi & Keuangan Vol. 3, No. 1, Maret 2012. Halaman 139 – 152.
- Birnberg J., Luft J, dan Shields M.D., 2006. *Phsyhology Theory in Management Accounting Research*. Handbook of Mangement Accounting Research. Elsevier.
- Copra S. dan Meindl, P. (2010). *Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operation*. 4th ed. NJ: Pearson Education.
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. 2014. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*. Journal of Rural and Development. Volume V No. 1 Februari 2014
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. 2014. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*. Journal of Rural and Development. Vol. 5 No. 1.
- Harmono. 2009. *Manajemen Keuangan berbasis Balance Scorecard Pendekatan Teori, Kasus dan Riset Bisnis*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Hidayat, Akhmad Bagus dan Eva Hany Fanida. 2016. *Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) dalam Upaya Pengembangan BUMDesa Surya Sejahtera Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*. Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 4 nomor 9
- Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 *tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa* Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 *tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *tentang Desa*

- Kemendragi. 2021. *Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Desa*. Jakarta : Kemendragi
- Pujawan, I. Nyoman (2005). *Supply Chain Management*. Surabaya: Guna Widya.
- Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawanto dan Suwondo. 2013. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1 No. 6. Hal 1068-1076.
- Sartono, R Agus. 2017. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : BPF
- Senjani, Yuyu Putri. 2019. Peran Sistem Manajemen Pada Bumdes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 2, No.1, Hal 23 – 40
- Wijayanti, Anita Wahyu, Mujibur Rahman Khairul Muluk dan Ratih Nurpratiwi. 2012. *Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan*. Jurnal Wacana Vol. 15 no, 3